Realism: Law Review
Volume 2 Nomor 3
Desember 2024

Pernikahan Anak Usia Dini di Media Sosial: MUI Dalam Sorotan Publik (Studi Kasus Kabupaten Wajo)

Abd. Haris [1] dan Nurfaika [2]

[1]Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/ Universitas PTIQ Jakarta/ Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Indonesia, abd.haris1890@gmail.com
[2] Pendidikan Bahasa Arab/ Universitas Islam As'adiyah Sengkang/ Sengkang, Kab. Wajo, Sul-Sela, Indonesia, nurfaikazz1990@gmail.com

Abstract

This study examines the phenomenon of child marriage in Indonesia, specifically in Wajo Regency, South Sulawesi. The findings reveal that the practice of child marriage remains a serious problem that requires urgent attention from various stakeholders. Collaboration between religious leaders (ulama) and government officials (umara) is key in reducing the prevalence of child marriage. Through various education programs, socialization, and law enforcement, it is hoped that public awareness of the negative impacts of child marriage can be increased. The study found that child marriage not only violates children's rights but also contradicts the objectives of Islamic law. Although marriage aims to establish a harmonious family, early marriage can hinder the achievement of this goal. Children who marry at a young age lack the physical, mental, and emotional maturity required for married life. This research highlights the importance of the roles of government, religious institutions, and the community in preventing and addressing child marriage. Efforts that need to be undertaken include improving the quality of education, providing reproductive health services for adolescents, and strengthening law enforcement against perpetrators of child marriage. It is hoped that these efforts will lead to a decrease in the number of child marriages in Indonesia, particularly in Wajo Regency.

Keywords: *Child marriage, Government, Ulama and Umara.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan anak usia dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kolaborasi antara ulama dan umara menjadi kunci dalam upaya menekan angka pernikahan anak. Melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum, diharapkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dapat ditingkatkan. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan anak usia dini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Meskipun pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang

sakinah, mawaddah, warahmah, namun pernikahan dini justru dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Anak yang menikah di usia dini belum memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi pernikahan anak usia dini. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pernikahan anak. Dengan demikian, diharapkan angka pernikahan anak usia dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo, dapat terus menurun.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pemerintah, Ulama dan Umara.

A. PENDAHULUAN

Indonesia salah satu Negara yang cukup tinggi kasus perkawinan anak usia dini. Berdasarkan penelusuran data pada Badan Pusat Statistik Tahun 2017 mencapai angka 67%. Dalam penyebarannya di 23 Provinsi rata-rata kasusnya mencapai 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia darurat praktik perkawinan anak usia dini (Koalisi Perempuan, 2017). Realitas di media sosial menjadi bukti betapa memprihatinkan anak-anak yang kehilangan haknya. Prevalensi perkawinan anak menjadi topik penting. Mengingat kesehatan, psikologi, kesiapan mental menjadi prioritas negara dan agama terhadap generasi unggul di masa yang akan datang (BPS, 2015). Kondisi tersebut mengancam sekaligus membahayakan bagi anak-anak dalam masa-masa pertumbuhannya.

Problematika sosial yang terjadi hari ini, belum sepenuhnya terjawab secara memadai oleh *Ulama'* dan *Umara'* dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Urusan Agama (KUA), Pemuka Agama, dan pemerintah yang memiliki otoritas setempat (*local authorities)* untuk menekan angka dan kasus pernikahan anak. Situasi sosial, tradisi, budaya terus bergerak dan berkembang mengiringi kemajuan teknologi. Melihat ragam fenomena yang mencuat di media sosial, belum direspons secara memadai

dan secara menyeluruh (Yusuf, 2020). Pernikahan sejatinya menjadi ikatan suci yang memberikan sepenuhnya nilai-nilai ajaran agama, justru agama seolah-olah tidak berperan penting pada sebagian besar masyarakat di Indonesia. Agama yang idealnya menjadi tonggak utama dalam mengokohkan suatu perkawinan, serta memelihara keturunan (*hifdz an-nasl)* (Fauji Hadiono, 2018). Tetapi, prakteknya di tengah masyarakat modern saat ini masih sangat minim dalam mempertimbangkan faktor agama, mental dan kesiapan fisik dalam pernikahan (Ali, 2015). Bukankah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ada visi yang ingin dicapai oleh suatu keluarga, setidaknya merasakan kualitas keluarga yang harmoni, *Sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah.*

Pada Minggu, 22 Mei 2022 lalu kembali menarik perhatian publik tentang pernikahan anak usia dini di media sosial, tepatnya di Pallae, Kelurahan Wiringpalennae. Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Pahlevi, 2022a). Meskipun pernikahan tersebut sebelumnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Kelurahan karena masih di bawah umur, namun, warga masih saja nekat menggelar pesta pernikahan anaknya tanpa melalui pencatatan agama dan negara (Pahlevi, 2022b). Hal tersebut menjadi salah satu tanda penerapan hukum masih sangat rendah. kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru dan pertama kali terjadi. Masa-masa pandemi tahun 2020 lalu meningkat, bahkan setelah adanya dispensasi nikah anak melonjak hingga 300 persen dari tahun sebelumnya. Artinya tahun 2020 cukup tinggi (Virgiawan, 2021).

Kasus-kasus yang masih *tranding topic* tentu menjadi catatan penting yang tidak hanya dialamatkan kepada Pemerintah, MUI, KUA, Pemerintah setempat, tetapi juga dialamatkan kepada para orang tua untuk lebih peka dan jeli pada persoalan yang menimpa anak-anak sekarang ini dengan berbagai pertimbangan bagi fisik dan psikologisnya. Bukan justru orang tua yang memaksakan anak-anak mereka untuk

menikah pada umur yang tidak semestinya dan belum waktunya dengan pertimbangan banyak hal dan risiko yang akan timbul akibat pernikahan dini.

Tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis fenomena sosial tentang pernikahan anak usia dini yang masih marak terjadi. Sehingga, setiap kali peristiwa seperti ini terjadi, MUI menjadi sorotan publik. MUI dianggap tidak tegas, harus ada fatwa, dan bahkan sorotan publik pun mengarah kepada Pemerintah tidak mampu memecahkan isu-isu nasional di media sosial (Virgiawan, 2021). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data yang tidak hanya dari sumber primer dan sekunder, tetapi melihat faktor-faktor dan penyebabnya di lapangan, kemudian mengumpulkan data-data yang terjadi di lapangan, kemudian mengolah data, serta mencari langkah strategis dalam mengurangi pernikahan dini di lingkungan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Wajo pada khususnya. Sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat tentang efek pernikahan dini.

Agar tidak mengambang, tulisan ini akan fokus pada akar permasalahan yang akan menjadi sub pembahasan; yaitu bagaimana MUI merespons pernikahan anak usia dini. Bagaimana sinergisitas dan Langkah strategis yang dilakukan MUI (*Ulama'* dan *Umara')* dalam meminimalisir dan menekan angka pernikahan usia dini. Dan bagaimana tinjauan maqashid asy-syari'ah dalam konteks *hifz addin* dan *hifzl annasl* sebagai *problem solving* dalam mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam fenomena pernikahan anak di bawah umur di Indonesia, khususnya peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengatasinya. Data primer akan diperoleh

melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti tokoh agama, pejabat pemerintah, orang tua yang terlibat, dan para ahli. Selain itu, diskusi kelompok terfokus dengan masyarakat akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Data sekunder berupa dokumen seperti fatwa MUI, kebijakan pemerintah, dan laporan penelitian juga akan dianalisis. Analisis data akan dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama, serta menggunakan analisis naratif untuk memahami pengalaman individu. Studi kasus pada komunitas tertentu akan memberikan gambaran yang lebih kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi praktik pernikahan dini khususnya di Kabupaten Wajo, serta mengevaluasi efektivitas respons MUI. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah dan mengurangi kasus pernikahan anak di bawah umur di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Respon MUI Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini

Disparitas keberagamaan akhir-akhir ini selalu ramai diperbincangkan dan diviralkan di media sosial. Misalnya warga yang menikah dengan binatang dipublikasikan, meskipun niatnya membuat konten, tetapi hal tersebut dianggap memalukan Indonesia, ditambah akses informasi yang cepat menjadikan pengguna media yang membaca dan menyaksikan langsung melalui *youtube, facebook, tiktok* dan media lainnya pun turut berkomentar. Salah satu dari sekian kasus yang terjadi adalah pernikahan usia dini yang masih marak. Di beberapa media, mulai dari kalangan atas

hingga kalangan bawah memberikan komentar. dan pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu menjadi sorotan karena dianggap peristiwa ini adalah ranah dan otoritas MUI. Misalnya, kenapa pernikahan usia dini bagi masyarakat Indonesia masih ramai terjadi? Di mana peran MUI?, kenapa tidak ada fatwa yang tegas dari MUI?, apakah tidak ada edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat, khususnya orang tua?, kenapa tidak diramaikan melalui seminar dan *workshop?*. Dan ada yang mempertanyakan, di mana sinergisitas MUI dengan pemerintah (*Ulama'* dan *Umara)* sampai pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten dan Kecamatan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi PR Bersama. Meskipun pada hakikatnya yang lebih berhak dan memiliki otoritas penting adalah MUI untuk menangani bias pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bukan tidak bisa diminimalisir dan dicegah, tetapi sejauh ini bagaimana MUI merespon sedemikian tegas. Terjadinya pernikahan dini dari berbagai media masih menjadi isu hangat diperbincangkan. Misalnya situs Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Republik Indonesia, melakukan seminar daring lintas agama untuk mengadvokasi dan sosialisasi untuk memperbincangkan, menangani fakta tersebut, dan harus menganalisis motif-motif pernikahan dini. Menurut Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Agustina Erni bahwa pernikahan dini adalah pelanggaran hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (KEMENKO PMK) Muhadjir Effendi meminta MUI untuk segera menetapkan fatwa untuk mencegah pernikahan usia dini. Melihat pembangunan karakter pada anak-anak juga mengalami pergeseran. Apabila tidak ada pergerakan yang cepat untuk

mengubah *mindset* dan perilaku warga dan generasi-generasi sekarang ini, baik itu melalui pembinaan karakter, pendidikan berkarakter, maka harapan pemerintah dalam mewujudkan generasi emas 2024 akan gagal. Harapan tersebut menjadi suatu bukti bahwa Pemerintah betul-betul ingin mewujudkan kualitas manusia (*quality of humanity)* tidak terlebih kepada pemuda-pemuda harapan bangsa yang menemukan jati dirinya sebagai generasi unggul (Kemenko PMK, 2021).

Apabila kasus pernikahan anak usia dini dibiarkan dan terus terjadi, masa-masa yang akan datang akan melahirkan generasi yang tidak produktif dan tidak preventif terhadap upaya membangun bangsa yang lebih maju dan unggul (Citrawati, 2019). Untuk mewujudkan harapan bangsa, negara, bahkan agama pun menjadi kacau karena tidak ada perhatian dan keprihatinan pemerintah dan ulama terhadap generasi muda utamanya anak-anak. Secara substansial dan utama yang harus ditelusuri adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam realitas sosial sangat jelas bahwa penyebab terjadinya pernikahan usia dini yaitu; tidak lepas dari persoalan hukum, ekonomi, adat istiadat, sosial budaya, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Tentu alasan lain akan muncul. Mengingat pernikahan anak usia dini masih marak terjadi (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Studi kasus pernikahan anak usia dini di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tepatnya di Wiring Palennae. Bocah yang bernama Muh. Ferdi dan Nikma Sari cukup menggemparkan Kabupaten Wajo, bukan hanya karena usianya yang masih muda belia 14 tahun (MF) dan 15 tahun (NS), tetapi karena terjadinya perjodohan oleh keluarga mempelai yang bertetangga serta ada hubungan keluarga (Aji, 2022).

Berdasarkan hasil analisis data bahwa Wajo pada tahun 2020 terdapat 506 kasus yang menikah muda meningkat menjadi 746 kasus menikah muda. Setelah melihat perkembangan data, kasus pada tahun 2022 meningkat menjadi 196 kasus dan

permohonan dispensasi. Dalam catatan daerah tahun 2013-2015 rata-rata menikah muda dengan usia 20-24 tahun, menikah sebelum 18 tahun memicu angka perceraian lebih tinggi dibanding menikah setelah usia 18. Akhirnya angka perceraian mencapai 4,53% dan menikah setelah 18 tahun angka perceraian 3, 02%. Artinya pernikahan sebelum usia 18 tahun lebih tinggi dari pernikahan setelah usia 18 tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.).

Alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Wiring Palennae Wajo, karena demi menghindari perzinaan. *Viral*nya pernikahan tersebut juga menuai respon dari Kepala Dinas Kementerian Perlindungan Anak, menelusuri langsung di kediaman mempelai sekaligus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada warga bahwa anak usia dini masih panjang perjalanan. Dalam sosialisasinya juga menyampaikan kepada warga bahwa kabupaten Wajo termasuk kabupaten yang paling tinggi pernikahan usia dini di Sulawesi Selatan. Salah satu kekhawatiran Kepala Dinas Kementerian Perlindungan Anak adalah anak melahirkan anak. Fisiknya belum matang dan belum siap, bahkan pertumbuhan reproduksi anak masih terus terjadi hingga usia di mana beranjak menjadi dewasa. Dan itulah sebabnya kenapa hak anak harus diberikan sepenuhnya, baik hak agama, negara untuk kemudian dibina dan dididik hingga benar-benar mencapai fisik dan psikis yang sempurna (Youtube, n.d.).

Viralnya pernikahan usia dini di media sosial, menuai respon serius dari Dinas Perlindungan Anak Kota Makassar mengklarifikasi kebenaran berita tersebut. Ternyata banyak alasan muncul misalnya, mempelai lelaki nekat menikahi pasangannya karena khawatir kekasihnya akan direbut orang lain, seperti perbincangan tersebut di *youtube* meskipun kronologi pernikahan tersebut bermula karena berboncengan (Youtube, n.d.) Suatu alasan yang tidak logis dan tentu menuai respon. Apakah anak-anak yang

berboncengan harus dinikahkan? Asumsi lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan adalah faktor ekonomi, padahal terlihat jelas dari mempelai laki-laki memberikan *uang panaik* sebesar 32 juta. Alasan ini juga membuktikan bahwa ternyata uang panaik seolah-olah jauh lebih berharga dibandingkan mahar. Padahal di dalam agama mahar itulah yang menghargai istri. Kurangnya pemahaman agama masyarakat, sehingga memunculkan kesalahpahaman. Harus diakui bahwa pemahaman terhadap agama menjadi prioritas *Ulama'* dan *Umara'* setempat, meskipun peran pemerintah dari atas ke bawah (*top down)* harus tetap dilakukan secara masif, agar antara *Ulama'* dan *Umara'* memiliki sinergisitas yang kuat.

Wakil MUI Kabupaten Wajo KH. Muhyiddin Tahir merespons bahwa salah satu hal yang menjadi faktor, karena sosialisasi terkait pernikahan usia dini belum merata, apalagi sampai titik-titik daerah tertentu yang masih rentang menjodohkan anaknya (TvOne, 2022). Mengingat bahwa kabupaten Wajo termasuk daerah yang memiliki jiwa dagang tinggi, sehingga menurut masyarakat Wajo, Bakri Ramang bahwa atas dasar tersebut kebanyakan masyarakat memilih dan lebih mengutamakan menikahkan anaknya di usia dini dengan alasan bisa meneruskan usahanya. Betapa tidak, pemahaman-pemahaman seperti itu masih banyak ditemukan. Alasan lain misalnya masyarakat mengutamakan pernikahan dini dari pendidikan, karena mereka menganggap bahwa pendidikan ujung-ujungnya mencari uang (Rahman, 2017).

Perjodohan yang terjadi masih ada unsur-unsur tradisi, dan tidak hanya terjadi di pelosok desa, tetapi juga masih ditemukan di kota. Desakan perjodohan terkadang tidak hanya dari orang tua, bahkan neneknya yang sudah berumur lansia pun tidak sabar ingin menyaksikan cucunya. *Mindset* sebagian masyarakat bahwa setelah menikahkan anaknya, orang tua sudah lepas tanggung jawabnya. sebagaimana hasil wawancara salah

satu warga di Sabbangparu, Nawir Faisal menuturkan bahwa yang menjadi alasan terjadinya pernikahan usia dini beranggapan bahwa anak perempuan sangat berbeda dari aspek sosial dan pergaulannya. Dan berasumsi bahwa menjaga dan memelihara anak gadis lebih sulit dibanding anak laki-laki. Sehingga atas dasar itu, orang tua jauh lebih merasa aman dan lepas tanggung jawabnya (Nawir Faisal, 2024). Yang menarik perhatian juga, karena orang tua masih mengkhawatirkan terjadinya kualat. Artinya merasa takut yang akan menimpanya. Misalnya anak gadis yang pernah dilamar sekian banyak laki-laki atau pemuda, tetapi tidak satu pun yang diterima dengan pertimbangan pendidikan. Artinya anak gadisnya masih ingin menempuh pendidikan. Selain itu juga, karena pilihan orang tua terhadap pemuda yang melamarnya. Apabila orang tua melihat pemuda yang melamar anak gadisnya sudah mapan, katakanlah ada usaha dan bisnis yang dijalani pemuda yang akan melamarnya, maka orang tua harus menerimanya. Karena kalau tidak diterima dari sekian banyak pemuda yang pernah melamarnya, khawatir suatu saat nanti tidak ada lagi pemuda yang datang melamarnya, karena terlalu sering menolak lamaran orang lain (Nawir Faisal, 2024).

Fakta lain yang masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat Wajo tentang tradisi perjodohan, adanya *kufu* atau *kafa'ah.* Yaitu tingkat keserasian, sebanding antar calon mempelai. Misalnya soal status sosial dan keturunan. Misalnya hari ini di Wajo masih ditemukan pernikahan anak usia dini dari segi faktor keturunan (*nasl).* Dalam istilah suku *bugis* "*darah biru*" atau faktor bangsawan dari masing-masing mempelai yang akan melakukan pernikahan, sama-sama berdarah biru, artinya kedua mempelai sama-sama bangsawan dan bergelar "*andi, petta, baso* atau besse'". Dan orang tua yang akan menikahkan anaknya sudah tidak perlu menolak lagi, karena sudah sederajat, sudah sama-sama berdarah biru (Nawir Faisal, 2024).

Fenomena tersebut menjadi alasan bahwa pemahaman agama masyarakat soal pernikahan masih sangat membutuhkan edukasi, bimbingan dan sosialisasi secara merata sampai ke pelosok-pelosok tertentu. MUI Kabupaten Wajo menambahkan faktor lain seperti sosialisasi UU Perkawinan belum merata (NewsTvOne, 2022). Respon yang serupa disampaikan bapak Bupati Kabupaten Wajo Amran Mahmud, terkait faktor pernikahan anak usia dini yang baru-baru terjadi tidak lepas dari faktor norma dan budaya dalam hal ini perjodohan, ekonomi rendah (MetroTV, 2022). Penelusuran terkait alasan-alasan pernikahan masih butuh proses, sehingga mengetahui secara dasar akar permasalahan tersebut terjadi. Secara garis besar dapat disimpulkan penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini di Indonesia *pertama* faktor norma dan budaya, *kedua* faktor konten dewasa (pornografi), ketiga faktor ekonomi *keempat,* faktor status sosial *kelima* faktor geografis *keenam* faktor pemahaman keagamaan *ketujuh* faktor sosialisasi yang tidak merata (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.). Dari uraian tersebut, Majelis Ulama Indonesia baik Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga Kantor Urusan Agama menjadi sorotan sekaligus menjadi desakan untuk terbitkan dan menetapkan fatwa terkait isu pernikahan anak usia dini tersebut. Mengingat kasus tersebut menjadi isu nasional dan bahkan internasional. Indonesia berada pada urutan ke 2 se-Asia sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto dalam wawancaranya di TvOne setelah *viral* pernikahan anak usia dini di Kabupaten Wajo Mei 2022 lalu (NewsTvOne, 2022). Susanto menambahkan bahwa mengubah perilaku publik berdasarkan norma tidak mudah, tetapi ada hal tertentu kemudian mudah dilakukan ketika ada sinergisitas dan dukungan dari *stakeholder* seperti MUI, KUA, Tokoh Agama, Masyarakat dan terlebih kepada dukungan orang tua. Artinya, Peraturan Pemerintah (PERMEN) yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun

2019 hadir sebagai bentuk perhatian terhadap anak-anak, menjaga sistem peradilan terhadap anak. Kerja sama dari berbagai berbagai unsur pemerintah harus diutamakan. Kasus tersebut menjadi tugas bersama demi mengubah perilaku dan *mindset* masyarakat.

Sekretaris umum MUI Provinsi Sulawesi Selatan KH. Muammar Bakry berkomentar terkait dengan pernikahan anak usia dini di Wajo bahwa batas minimal umur anak dalam pernikahan dalam fikih Islam itu memang tidak dijelaskan batasan umur pernikahan. ketika melihat hadis bahwa Aisyah r.a. dinikahi oleh Nabi di umur enam tahun dan tinggal bersama dalam mahligai rumah tangga di umur Sembilan tahun. Mencegah pernikahan dengan alasan pergaulan bebas sangat mulia, apalagi ada jalinan cinta, dan bahkan ada kesepakatan antar anak dan antar keluarga telah bersepakat itu akan lebih baik. Sudut pandang lain, memang kedua mempelai dianggap sudah akil baligh, maka dianggap terpenuhinya syarat sahnya pernikahan tersebut. Karena ada UU baru dari UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 bahwa Perkawinan hanya diizinkan, apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sehingga akan dianggap sah kalau perkawinannya mencapai 19 tahun (Mui-provsulsel, 2022).

Majelis Ulama Indonesia Miftachul Akhyar merespons, pernikahan usia dini yang terjadi hari ini, menuturkan bahwa tujuan perkawinan tidak lain untuk mencapai kemaslahatan dan harmoni rumah tangga, keluarga, sehingga akan menciptakan kualitas, awet dalam rumah tangga. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus tahu persoalan perkawinan, baik dari segi syarat sahnya suatu pernikahan, hingga persoalan UU Pernikahan. Semestinya pernikahan jangan memahami yang penting kawin saja, tetapi kalau tidak ada tujuan harmoni dalam rumah tangga juga belum dianggap berkualitas. MUI menambahkan salah satu faktor pernikahan usia dini tidak lepas dari faktor konten-konten dewasa, pornografi yang mengakibatkan anak-anak terpapar dan kecanduan,

sehingga harus diatasi secepatnya (Roosa, 2021). Secara umum dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang terjadi, ada dua (2) yaitu faktor umum dan faktor khusus.

2. Langkah Strategis MUI (Ulama dan Umara') Dalam Meminimalisir Pernikahan Anak Usia Dini

Problematika umat hari ini, menjadi tanggung jawab Pemerintah, Ulama, Tokoh agama, KUA dan oknum yang memiliki wewenang dan otoritas terhadap masyarakat sosial. Agama dan Negara memiliki hak untuk melindungi, mengedukasi, dan membimbing warganya. Sinergisitas antar *Ulama'* dan *Umara'* memiliki otoritas dan kemampuan dalam mewujudkan bangsa yang berperadaban, bermoral, berakhlak agar menuju bangsa yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.* Di dalam Hadis Nabi saw. bahwa "sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya", (HR. al-Bukhari). Salah satu bentuk perhatian yang diharapkan hari ini tidak lepas upaya yang strategis dalam menekan angka pernikahan usia dini. Utamanya mampu mengubah cara pandang masyarakat. Menikah di usia dini tidak sepenuhnya berada dalam keluarga yang harmoni, sementara salah satu pijakan rumah tangga adalah terpenuhinya kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan (Ali, 2015).

Keterlibatan *Ulama'* dan *Umara'* merupakan energi positif yang akan menciptakan suatu kemaslahatan anak. Apabila kemaslahatan anak-anak tidak dijaga, maka akan ada risiko yang besar yang akan mempengaruhi fisik dan psikis anak. Yaitu *pertama* dampak serius yaitu kemungkinan besar akan melahirkan anak stunting. Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dini biasanya mengalami gangguan pertumbuhan dan sebab nutrisi, berakibat gizi buruk, infeksi tulang atau rentang keropos tulang dan psikososial tidak memadai. selain itu, biasanya juga akan mengalami persalinan yang macet, karena diameter pinggul perempuan selebar 8 cm, dan rata-rata ukuran kepala bayi 9,8 cm.

sementara pertumbuhan dan ukuran pinggul baru akan membesar pada usia 19-21 tahun. Selanjutnya, risiko kematian dua kali lebih besar saat hamil (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.). Dampak yang *kedua* dampak kesehatan. Yaitu rentang kanker pada bagian mulut rahim atau pada sistem reproduksi, karena belum berkembang secara sempurna. Mengakibatkan pertumbuhan tulang terhenti dan cenderung keropos.

Bupati Wajo Amran Mahmud gencar-gencarnya mencari upaya dan strategi meminimalisir pernikahan usia dini dan merangkul semua *stakeholder* menyatukan langkah dan persepsi penurunan angka tersebut. Berikut strateginya :

1. Gerakan bersama untuk mensosialisasikan secara masif dampak yang ditimbulkan pernikahan anak usia dini, baik melalui Dinas Sosial, spanduk-spanduk dan media sosial.
2. Edukasi melalui KUA, mimbar-mimbar dakwah, khotbah agar bisa merata sampai ke pelosok.
3. Pembinaan warga harus dilakukan oleh Pemuka Agama yang memiliki wewenang untuk menyampaikan.
4. Pembinaan generasi muda dengan menggiatkan kegiatan-kegiatan anak seperti forum genre generasi terencana, dan tentunya melibatkan anak-anak untuk ikut serta dalam pemilihan duta gedre.
5. Gerakan Darmawanita, PKK, Majlis Taklim, ormas untuk memberikan pemahaman kepada warga.
6. Bapak Bupati juga menghimbau warganya yang melakukan pernikahan anak usia dini dengan sangsi administratif. Dan yang terpenting adalah dampak jangka panjang bagi pendidikan anak dan pengaruhnya terhadap administrasi sekolah.

Sejauh ini, pemerintah Kabupaten Wajo sangat optimis agar semua *stakeholder* sebisa mungkin merangkul para orang tua, agar kebiasaan-kebiasaan menjodohkan anaknya, untuk tidak melakukan perjodohan itu, mengingat sangat mengganggu proses pertumbuhan anak, pengaruh psikis dan kesehatan mental bagi anak. Kasubdit Kepenghuluan, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Anwar Saadi menyatakan bahwa pernikahan anak usia dini dianggap tidak patuh terhadap konstitusi di Indonesia, dan sangat tidak mendukung jalannya program untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Karena dipastikan anak usia dini sangat masih labil dan dipastikan tidak matang serta masih jauh kesiapan mereka menjadi orang tua. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan memberikan hak anak, maka kasus tersebut bukan hanya tugas pemerintah semata tetapi butuh kolaboratif dan kerja sama dari unsur masyarakat, akademisi dan para orang tua (CNN Indonesia, 2022).

3. Tinjauan Maqashid (*Hifdz al-Din* dan *Hifdz al-Nafs*)

Pernikahan merupakan bagian dari skala prioritas di dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan syariat Islam sebagai umat yang mengikuti sunnah Rasulullah saw. dan termasuk ibadah yang sakral. Pernikahan tidak hanya berdasarkan cinta, suka sama suka, lebih dari itu ada beban moral dan tanggung jawab yang sangat besar. Karena itu pernikahan adalah suatu ikatan suci dalam membangun mahligai rumah tangga atas dasar agama. Ketika pernikahan terjadi tetapi tidak mengindahkan syarat dan rukun, sebenarnya sama saja meninggalkan kesakralan dari pernikahan tersebut. Islam adalah agama panutan, contoh, sehingga, perkara-perkara dunia ada aturannya dalam Islam, dari yang kecil hingga pada persoalan besar yang menjadi bagian keindahan dan kemaslahatan umat manusia (Wibisana, 2016).

Praktik-praktik pernikahan di pernikahan yang terjadi di media sosial, tidak sepenuhnya selaras, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Padahal, lahirnya suatu hukum, tentu ada dasar yang menjadi pegangan sebagai pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat (Khallaf, 2003). Di satu sisi, pernikahan bisa saja terjadi, sesuai dengan agama, tetapi di sisi lain dianggap melanggar aturan hukum negara dan UU yang berlaku. sehingga, pernikahan memiliki kemafsadatan bagi orang yang melakukan pernikahan.

Kemaslahatan akan muncul sebagai suatu solusi bagi umat dengan berbagai pertimbangan bahwa akan ada kerusakan, bahaya atau risiko besar yang menimpa seseorang. Oleh karena itu, kemaslahatan adalah bagian dari acuan syariat atau *hujjah syar'iyyah*, *shalihun likulli zaman wa makan*. Tidak terbatas pada bagian-bagiannya saja, individu, tetapi kemaslahatan umat (Khallaf, 2003). Pernikahan anak usia dini pada dasarnya tidak ada larangan. Sejauh telah memenuhi kriteria pernikahan dalam agama. Sehingga Ijtima' MUI menyatakan bahwa pernikahan usia dini tidak diharamkan. Ketika melihat praktik pernikahan yang terjadi di sisi Rasulullah saw. dalam suatu riwayat ketika Aisyah dinikahi Nabi saw. pada umur enam tahun, bahkan di dalam riwayat itu dikatakan Aisyah digauli ketika berumur sembilan tahu (Bisyri, 1997).

Fakta sosial memberikan informasi dan dampak negatif pernikahan pada usia dini, hal itu pula yang menjadi pertimbangan dan lahirnya UU perkawinan anak usia dini. Indonesia hari ini berada pada puncak darurat pernikahan usia dini. Dengan berbagai motif, sebagaimana sebelumnya diuraikan kemafsadatannya secara fisik dan psikis, bahkan terjadinya peningkatan angka perceraian, kematian akibat menikah di usia dini. Ketika kasus yang terjadi dilihat dari sisi kemaslahatan dan kerusakannya, hal tersebut menjadi cukup penting sebagai pertimbangan. Maka terbentuklah UU pernikahan agar seseorang yang hendak menikah tidak akan diberi izin sebelum berumur 19 tahun baik

dari pihak laki-laki maupun perempuan. Kemaslahatan yang hakiki adalah benar-benar menarik suatu manfaat dengan pertimbangan menolak bahaya, dan jika seandainya hanya menarik manfaat tanpa membandingkan dengan menarik suatu bahaya, maka hal itu hanya berdasarkan kemaslahatan semu (Khallaf, 2003). Mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan kemudian menarik suatu kesimpulan bukan kerja mudah, sehingga para ulama dengan segala analisis, perkembangan realitas di lapangan harus benar-benar tahu. Atas dasar kemaslahatan umum itulah menjadi kesepakatan sehingga di satu sisi umat bisa keluar dari kesulitan dan bahaya yang ditimbulkan (2021, مقربين).

Suatu kaidah dikatakan bahwa setiap *illat* akan melahirkan kemaslahatan. Berawal dari praktik di lapangan untuk memastikan fakta secara jelas atau yang dikenal dengan istilah *tahqiq al-manath bi as-syahadah,* artinya harus benar-benar menganalisis dan melihat fakta sosial dampak pernikahan dini, bahkan dari bukti-bukti dari dokter spesialis sekalipun harus menjadi bukti atas bahaya ditimbulkan bagi pernikahan anak usia dini (2016, أحمين). Ketika menemukan dampak negatif, keburukan yang ditimbulkan pun cukup besar dan sudah melalui proses analisis, dan bahkan kemafsadatannya meningkat. Misalkan dalam pernikahan anak usia dini, menimbulkan stunting, gangguan fisik, psikis, perceraian dan hingga pada kematian, maka, dari hasil analisis tersebut bisa menjadi suatu illat kemaslahatan dengan mencegah kerusakan bagi jiwa anak yang menikah usia dini. Karena kemaslahatan tercipta untuk menjaga tujuan-tujuan syariat. Syariat yang dimaksudkan yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Dan segala sesuatu yang meliputi yang lima dasar tersebut itulah kemaslahatan dan menjaga yang lima ini lebih kuat dari kemaslahatan (2011, الغزالي). Sehingga bila pernikahan anak dengan biologis anak, baik itu kedewasaannya, kesiapan mental, stunting anak, kematian dan banyak dampak negatif lainnya yang akan muncul. Maka, hasilnya mendatangkan sisi menolak

bahaya yang lebih utama. Sekalipun ada tujuan syariat di dalamnya, akan tetapi pernikahan anak usia dini dianggap masih jauh dari tujuan-tujuan yang lainnya karena masih labil. Dalam kaedah "*dar'u al-mafasidi aula min jalbi al-mashalih"*. Jadi mencegah bahaya bagi jiwa anak-anak lebih utama dari kemaslahatan pernikahan (Rida, 2013).

D. PENUTUP

Pernikahan anak usia dini di Indonesia bukan hal yang baru terjadi. Karena melihat fenomena sosial dan berdasarkan fakta lapangan bahwa Indonesia merupakan negara nomor urutan kedua yang memiliki kasus pernikahan dini. Sehingga, desakan demi desakan dari berbagai pihak di media sosial, MUI tidak tinggal diam dan membiarkan hal tersebut terjadi dan semakin besar. Karena persoalan negara adalah bagian kerja *Ulama'* dan *Umara'* dalam menekan angka perkawinan anak tersebut dengan segala upaya yang dilakukannya, sehingga memberikan kesadaran kepada warga bahwa pernikahan anak usia dini adalah hal yang tidak diinginkan. Mengingat kemafsadatannya jauh lebih berbahaya dibanding menarik manfaat di sana. Kolaborasi *Ulama'* dan *Umara'* merupakan kekuatan negara (*power of country)* yang harus ditegakkan dalam menekan dan meminimalisir angka pernikahan anak usia dini di Indonesia, khususnya Kabupaten Wajo melalui gerakan *stakeholder* dari pemerintah dan ulama, KUA melalui mimbar-mimbar dakwah, khotbah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Majlis Taklim, dinas-dinas terkait, PKK, Darmawanita, tidak terkecuali para orang tua untuk tidak menganggap remeh pernikahan anak, baik melalui perjodohan dan hal-hal lain sehingga terjadi pernikahan anak. Pemerintah juga membuat forum seminar, *workshop*, hingga pada kegiatan pemerintah yang melibatkan generasi-generasi milenial muda, misalnya Genre, generasi terencana, agar bisa berpartisipasi sekaligus mengedukasi dan mensosialisasikan

dampaknya. Pemerintah juga menyampaikan soal sangsi administratif bagi keluarga yang nekat melakukan pernikahan dini. Melihat fakta dan fenomena sosial yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Wajo pada khususnya. Mengingat Wajo merupakan daerah tertinggi kasus pernikahan anak usia dini di Sulawesi Selatan. Dari berbagai dampak yang terjadi secara umum bagi anak yang melakukan pernikahan usia dini dapat mengancam jiwa anak, baik fisik dan psikisnya. Sekalipun pernikahan memiliki tujuan-tujuan syariat termasuk menciptakan keluarga harmoni, melanggengkan pernikahan dan ingin memperoleh keturunan. Justru hal tersebut masih dianggap jauh untuk mencapai tujuan-tujuan syariat tersebut, karena anak yang menikah usia dini masih belum terbentuk jiwa yang mental, kedewasaan yang matang dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk menjaga dan mencapai *hifdz addin* dan *hifdz nasl*. Sementara apabila pernikahan anak usia dini dibiarkan terjadi, maka kemafsadatannya jauh lebih berbahaya atau merusak bagi anak. Dan pada akhirnya juga tidak dapat mencapai kemaslahatan pernikahan untuk mencapai tujuan syariat, karena jauh lebih utama menyelamatkan jiwa, menolak bahaya daripada menarik manfaat atas pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Surmiati. “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 10 (2015): 1–28.

Atheists, New, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Michael Stausberg, and Michael Stausberg. *Contemporary Theories of Religion a Critical Companion*. Edited by Michael Stausberg. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2009.

Aziz, Moh Ali. “SIGNIFIKANSI ILMU-ILMU AL-QUR ’ A N” I, no. 932 (2009): 60–68.

Azriani, Alfin Nuri. *Inter Relasi Al-Qur’an Dan Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Mustofa*. Surabaya: Repository UIN Sunan Ampel, 2020.

Bisyri, Mohammad Hasan. “Penerapan Teori Maqasid Asy-Sy Ari’a h Dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia,” no. 9 (1997).

BPS. “Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia Tahun 2017,” 2017. www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-anak-18-des-17-2.pdf.

Citrawati, Enik. “Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat.” *Qawwam* 12, no. 2 (2019): 132–51. https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.794.

Dalam, Nilai-nilai Edukatif, Aqiqah Dan, Implikasinya Dalam, and Pembentukan Kepribadian. *Nilai-Nilai Edukatif Dalam Aqiqah Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Kepribadian Anak*. Semarang, 2006.

Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136.

Fauji Hadiono, Abdi. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX, no. 2 (2018): 2549–4171.

Hude, M. Darwis. *Logika Al-Qur’an, Pemaknaan Ayat Dalam Berbagai Tema*. Edited by Abd. Muid N. I. Jakarta Timur: Penerbit Eurabia PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2015.

Keyes, Charles, and Charles F Keyes. “WEBER AND ANTHROPOLOGY,” 2002.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani-Jakarta, 2003.

Kunci, Kata. “Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral,” no. 1 (2013): 53–63. https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1287.

Prosiding Kementerian Agama. *Muktamar Pemikiran Santri Nusantara; Islam, Kearifan Lokal Dan Tantangan Kontemporer*. Edited by Muhammad Sofi Mubarak Dkk. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Agama Republik Indonesia, 2018.

Rida, Abdul Karim Zaidan; terj. Muhyiddin Mas. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Edited by Yasir Maqosid. Kedua. Jakarta: Al-Kautsar, 2013.

Rouf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari*

Abdur Rauf As-Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab. I. Depok, Jawa Barat: Sahifa Publishing, 2020.

Shihab, M. Quraish. *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Pertama. Ciputat, Tangaerang: Lentera Hati, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Sebuah Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Solichin, Mohammad Muchlis. "April 2018; Revised: 25" 5, no. 1 (2018): 86–100.

Statistik, Badan Pusat. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia, 2015.

Syam, Anna Rahma. "Tradisi Barjanzi Dalam Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone." *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 1 (2016): 59–84.

Wibisana, Wahyu. "Faktor-Faktor Penyebab Perempuan Dalam Melakukan Pernikahan Siri (Studi Deskriptif Pada Perempuan Yang Menikah Siri Di Desa Arjasa)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

Wijaya, Subur. "Kritik Wacana Tafsir Tentang HAM" 18, no. 1 (n.d.): 29–62.

Yusuf, Muhammad. "Modernitas Dan Keindonesiaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 6, no. 1 (2020): 1–21.

أحمين, محمد. *مقاصد الموافقات: التسهيل لكتاب المقاصد من الموافقات لأبي اسحاق الشاطبي*. الطبقة 1. القاهرة: دار الكلمة, 2016.

الغزالي, الامام أبى حامد محمد بن محمد. *المصتصفى من علم الأصول*. الطبعة الا. القاهرة: رار الحديث, 2011.

مقربين, كياهي حاج زلفى مصطفى بن. *الفتوى ومالا ينبغى للمفقه جملة, التطبيقات الأصولية في الفتاوى الإندونيسية*. الطبعة الث. جاكرتا الجنوبية: مياع للطباعة والنشر, 2021.

Wawancara

Nawir Faisal (Tokoh Masyarakat), wawancara oleh Abd. Haris *Via Telpon*, Universitas PTIQ Jakarta. Tanggal 17 Juli 2024.